

**ANALISIS BANTUAN KREDIT DARI DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI  
TERHADAP PERKEMBANGAN UMK BINAAN  
KUB RUKUN MINA BAROKAH  
DI KECAMATAN JUWANA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**PRIYO HARSONO**  
**NIM. C2B006052**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Priyo Harsono  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006052  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Judul Skripsi : **ANALISIS BANTUAN KREDIT DARI DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PATI TERHADAP  
PERKEMBANGAN UMK BINAAN KUB  
RUKUN MINA BAROKAH DI KECAMATAN  
JUWANA**  
Dosen Pembimbing : Achma Hendra Setiawan, SE., MSi

Semarang, 11 November 2010  
Dosen Pembimbing,

(Achma Hendra Setiawan, SE., MSi)  
NIP. 196905101997021001

Mengetahui,  
a.n. Dekan,  
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. H Arifin, M.Com.(Hons.), Akt.  
NIP. 196009091987031023

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Priyo Harsono  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006052  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Judul Skripsi : **ANALISIS BANTUAN KREDIT DARI DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PATI TERHADAP  
PERKEMBANGAN UMK BINAAN KUB  
RUKUN MINA BAROKAH DI KECAMATAN  
JUWANA**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 November 2010**

Tim Penguji

1. Achma Hendra Setiawan, SE. Msi. (.....)
2. Maruto Umar Basuki, SE. Msi. (.....)
3. Hastarini Dwi Atmanti, SE. Msi. (.....)

Mengetahui,  
a.n. Dekan,  
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. H Arifin, M.Com.(Hons.), Akt.  
NIP. 196009091987031023

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Priyo Harsono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Bantuan Kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Terhadap Perkembangan UMK Anggota KUB Rukun Mina Barokah di Kecamatan Juwana, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang, 11 November 2010  
Yang Membuat Pernyataan,

Priyo Harsono  
NIM. C2B006052

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“... Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap”*  
*(QS: Al-Insyirah 6-8)*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itu berusaha mengubah nasibnya sendiri”*  
*(Ar-Ra'du : 11)*

Karya sederhana ini penulis persembahkan teruntuk ayahanda,  
ibunda, dan kakak-kakak serta keponakan tercinta...

Kepada keluarga besar, sahabat, teman,  
dan para pembaca semuanya...

## ABSTRACT

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia have a major role in the economy. Since the monetary crisis hit Indonesia, UMKM did not experience bankruptcy due to the crisis. MSMEs in Central Java in 1999 controlled 30% of National MSMEs and can be used as alternative options that can be used to develop the local economy. One group of food processing MSMEs fisheries sector in Pati Central Java which has a good potential is the Joint Business Group (KUB) Rukun Mina Barokah.*

*The purpose of this study is to investigate developmental differences in KUB Rukun Mina Barokah before and after getting credit assistance from the Department of Marine and Fisheries Pati terms of capital, labor, the number of buyers, the total sales, and profits. The object of research is KUB Rukun Mina Barokah in Juwana as many as 45 small micro enterprises. Type of data collected are primary data and secondary data. Methods of data analysis include validity test, reliability test, and Wilcoxon sign rank test statistic.*

*Based on the results of Wilcoxon sign rank test statistics, obtained venture capital in the variable  $p$ -value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ). This means there is a significant increase in venture capital variable that is equal to 13%. In labor variables obtained  $p$ -value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ). This means there is a significant improvement on the labor variable that is equal to 15%. In the variable number of buyers obtained  $p$ -value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ). This means there is a significant increase in the variable number of buyers that is equal to 27%. On total sales acquired variable- $p$  value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ). This means there is a significant increase in total sales variable that is equal to 30%. In the variable gain obtained  $p$ -value of 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ). This means there is a significant increase in the variable gain that is equal to 32%.*

*Keywords: KUB Rukun Mina Barokah, Department of Marine and Fisheries Credit Pati, Business Capital, Labor, Number of Buyers, Total Sales, Profit.*

## ABSTRAKSI

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang besar dalam perekonomian. Semenjak krisis moneter melanda Indonesia, UMKM tidak mengalami kebangkrutan akibat adanya krisis tersebut. UMKM di Jawa Tengah pada tahun 1999 menguasai 30% UMKM Nasional dan dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi daerah. Salah satu kelompok UMKM pengolahan pangan sektor perikanan di Kabupaten Pati Jawa Tengah yang memiliki potensi cukup baik adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rukun Mina Barokah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perkembangan pada KUB Rukun Mina Barokah sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditinjau dari modal usaha, tenaga kerja, jumlah pembeli, total penjualan, dan keuntungan. Objek penelitian yaitu KUB Rukun Mina Barokah di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebanyak 45 usaha mikro kecil. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data meliputi uji validitas, uji reabilitas, dan uji statistik pangkat tanda wilcoxon.

Berdasarkan hasil uji statistik pangkat tanda wilcoxon, pada variabel modal usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal tersebut berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel modal usaha yaitu sebesar 13%. Pada variabel tenaga kerja didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal tersebut berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel tenaga kerja yaitu sebesar 15%. Pada variabel jumlah pembeli didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal tersebut berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel jumlah pembeli yaitu sebesar 27%. Pada variabel total penjualan didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal tersebut berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel total penjualan yaitu sebesar 30%. Pada variabel keuntungan didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal tersebut berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel keuntungan yaitu sebesar 32%.

**Kata Kunci :** KUB Rukun Mina Barokah, Kredit Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Modal Usaha, Tenaga Kerja, Jumlah Pembeli, Total Penjualan, Keuntungan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata atau S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Bantuan Kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Terhadap Perkembangan UMK Anggota KUB Rukun Mina Barokah di Kecamatan Juwana” tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Drs. H. Edy Yusuf A.G., M.Sc., Ph.D, selaku Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Drs. R. Mulyo Hendarto.MSP, selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis dan memberikan motivasi kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Bapak Achma Hendra Setiawan, SE.,MSi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan sangat baik, penuh kesabaran, nasehat dan saran yang tulus, dan segala kemudahan dalam meluangkan waktunya untuk bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah membukakan cakrawala ilmiah kepada penulis.

7. Bapak, ibu, kakak-kakak, dan keponakan penulis atas segala doa, dukungan moral, kepercayaan, kasih sayang, dan informasi serta fasilitas yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati beserta para stafnya atas segala informasi yang telah diberikan dalam penelitian ini.
9. Bapak Sugito selaku ketua KUB Rukun Mina Barokah yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Keluarga besar IESP 2006 terutama Indah dan Fajar yang telah berkenan direpotkan.
11. Keluarga besar *Singosari Brotherhood* (Ase, Mamed, Jabs, Asrul, Fajar, Kharis, Bahrul, Tangguh, Suryo, Desi, Ririn, Tina) atas dukungan moral kepada penulis.
12. Keluarga besar Wonodri Joho 513 (Pak Tris, Tiko, Lilik, Tedjo) atas dukungan moral kepada penulis.
13. Keluarga besar PSS Sembaturagung dan PB Balok Jenggot (Agus, Antok, Anang, Dian, Eko, Gun, Muklis dll) atas dukungan moral kepada penulis.
14. Keluarga besar *Suwarny Famz* (Om Wardono, Ririn, Dudung, Anri, Nana dll) atas dukungan moral kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi terutama bagi penelitian yang sejenis.

Semarang, 11 November 2010

Priyo Harsono  
NIM. C2B006052

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	41
2.4 Hipotesis.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional.....	43
3.2 Populasi Penelitian.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.5 Metode Analisis.....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Diskripsi Objek Penelitian.....	50
4.2 Deskripsi Kredit Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.....	52
4.3 Deskripsi Kelompok Usaha Bersama (KUB).....	55
4.4 Analisis Data.....	60
4.5 Uji Validitas dan Uji Reabilitas Instrumen Penelitian.....	67
4.6 Intepretasi Hasil.....	72
4.7 Deskripsi Kenaikan Variabel penelitian.....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Keterbatasan.....	79
5.3 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2004-2008.....	1
Tabel 1.2 Pengolahan Ikan Kabupaten Pati Tahun 2006-2008.....	5
Tabel 1.3 Produksi ikan olahan KUB Rukun Mina Barokah Tahun 2005-2007.....	6
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	61
Tabel 4.2 Pengujian Validitas Instrumen Modal Usaha.....	69
Tabel 4.3 Pengujian Validitas Instrumen Tenaga Kerja.....	70
Tabel 4.4 Pengujian Validitas Instrumen Jumlah Pembeli.....	70
Tabel 4.5 Pengujian Validitas Instrumen Total Penjualan.....	71
Tabel 4.6 Pengujian Validitas Instrumen Keuntungan.....	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	72
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Modal Usaha Sebelum dan Sesudah Kredit Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati....	74
Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Kredit Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati....	74
Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Jumlah Pembeli Sebelum dan Sesudah Kredit Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati....	75
Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Total Penjualan Sebelum dan Sesudah Kredit Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati....	76
Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Keuntungan Sebelum dan Sesudah Kredit Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati....	76

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoretis.....	42
Gambar 4.1 Mekanisme dan Prosedur Penyaluran Kredit Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KUB Rukun Mina Barokah.....	56
Gambar 4.3 Proses Pengolahan dan Distribusi Hasil Perikanan.....	59
Gambar 4.4 Presentase Alamat Responden.....	62
Gambar 4.5 Presentase Jenis Kelamin Responden.....	62
Gambar 4.6 Presentase Status Pendidikan Responden.....	63
Gambar 4.7 Presentase Lama Usaha Responden.....	63
Gambar 4.8 Rata-rata Modal Usaha Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Kredit Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.....	65
Gambar 4.9 Rata-rata Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Kredit Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.....	66
Gambar 4.10 Rata-rata Jumlah Pembeli Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Kredit Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.....	67
Gambar 4.11 Rata-rata Total Penjualan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Kredit Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.....	68
Gambar 4.12 Rata-rata Keuntungan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Kredit Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.....	69
Gambar 4.13 Presentase Kenaikan Variabel Penelitian.....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Krisis di Indonesia telah memberikan satu catatan penting tentang performa ekonomi di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tadinya kurang berperan dalam perekonomian Indonesia ternyata terbukti lebih mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis multidimensi (Muchlis, 2006).

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Oleh karena UMKM perlu dikembangkan karena dapat menggerakkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia dan perlu adanya pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peran ini semakin melekat semenjak krisis moneter melanda Indonesia dikarenakan UMKM di Indonesia tidak mengalami kebangkrutan akibat dari krisis tersebut. Hal ini perlu adanya pengembangan mengingat potensi UMKM di Indonesia sangat memungkinkan untuk dikembangkan (Assauri, 1993).

UMKM di Jawa Tengah menguasai 30% UMKM Nasional. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 1999 sebesar 3,49% berada jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang hanya 0,79% dan kontribusi tersebar berasal dari sektor UMKM. Data ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah merupakan alternative pilihan yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi daerah. Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian adalah sentral, namun kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dirasa belum maksimal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah setelah ekonomi Indonesia mulai membaik ternyata berada dibelakang pertumbuhan ekonomi nasional mulai tahun 2000-2004 (Emyll, 2005).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pati (2009), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tahun 2008 atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 4,94% dan secara agregat PDRD tahun 2008 atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 4.162,082 M. Sesuai dengan kondisi Kabupaten Pati yang merupakan wilayah agraris, maka pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian. Tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor industri pengolahan masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pati karena mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap total PDRB. Peranan sektor-sektor tersebut pada tahun 2008 masing-masing sebesar 35,44%, 17,83%, serta 18,77%. Sementara untuk peranan sektor lainnya besarnya masih di bawah sepuluh persen. Data PDRB Kabupaten Pati dari tahun 2004-2008 dapat diketahui pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar**  
**Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2004-2008 (Jutaan Rupiah)**  
**Tahun 2000 = 100,00**

<b>Lapangan Usaha</b> <i>Industrial Origin</i>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
1. Pertanian / <i>Agriculture</i>	1.207,69	1.234,42	1.267,46	1.320,54	1.378,78
1.1 Tanaman Bahan Makanan <i>Farm Food Crops</i>	753,37	793,70	834,54	866,42	902,43
1.2 Tanaman Perkebunan <i>Non-food Crops</i>	109,51	114,19	119,22	126,83	132,10
1.3 Peternakan & Hasil-hasilnya <i>Livestock and Product</i>	78,57	81,75	85,84	91,08	98,39
1.4 Kehutanan <i>Forestry</i>	17,18	17,82	18,94	19,98	20,59
1.5 Perikanan <i>Fishery</i>	249,03	226,94	208,89	216,21	255,26
2. Pertambangan & Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	26,69	27,56	29,88	31,70	844,43
3. Industri Pengolahan <i>Manufacturing Industry</i>	686,36	722,69	763,16	806,90	844,43
4. Listrik, Gas & Air Bersih <i>Electricity, Gas, and Water Supply</i>	37,02	39,25	42,66	46,43	48,38
5. Bangunan <i>Construction</i>	21,00	226,84	242,97	258,11	276,20
6. Perdagangan, Hotel & Restoran <i>Trade, Restaurant and Hotel</i>	676,78	699,74	728,56	764,79	795,69
7. Pengangkutan & Komunikasi <i>Transport and Communication</i>	142,67	148,00	154,45	161,24	172,53
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan <i>Financial, Ownership and Bussines Servis</i>	226,41	239,25	254,11	274,08	290,02
9. Jasa-Jasa <i>Services</i>	259,33	272,01	287,03	302,21	322,89
<b>PDRB</b>	<b>3.473,08</b>	<b>3.609,79</b>	<b>3.770,33</b>	<b>3.966,06</b>	<b>4.162,08</b>

Sumber data: BPS Kabupaten Pati, 2009

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Pati menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan 2000 mengalami kenaikan dari tahun 2004-2008. Pertanian yang merupakan sektor utama dari PDRB Kabupaten Pati mengalami kenaikan dari tahun 2004-2008. Kenaikan tersebut

didukung dari kenaikan pada masing-masing subsektor, akan tetapi pada subsektor perikanan justru mengalami penurunan dari tahun 2004-2006 dan mengalami kenaikan pada tahun 2007-2008.

Berdasarkan data kependudukan BPS Kabupaten Pati (2009), jumlah penduduk Kabupaten Pati sebesar 1.243.207 jiwa. Sebagian besar dari jumlah penduduk tersebut mengkonsumsi pangan lokal dari hasil olahan sektor perikanan dan kelautan. Kebutuhan akan produk olahan pangan tersebut dapat terpenuhi dari pengolahan pangan yang berasal dari lingkup Kabupaten Pati sendiri. Selama ini masyarakat beranggapan bahwa produk olahan pangan yang berasal dari ikan merupakan produk yang murah, bergizi, dan mudah untuk mendapatkannya. Hal ini cukup beralasan karena pada dasarnya pangan yang berbahan baku ikan mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi.

Kabupaten Pati juga mempunyai potensi yang sangat baik di sektor pengolahan ikan, walaupun pada tahun 2006-2007 terjadi penurunan produksi dan kenaikan produksi terjadi pada tahun 2008. Data kegiatan pengolahan ikan Kabupaten Pati selama tahun 2006-2008 dapat diketahui pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Pengolahan Ikan Kabupaten Pati Tahun 2006 - 2008**

No.	Kegiatan	2006		2007		2008	
		Unit	Produksi (kg)	Unit	Produksi (kg)	Unit	Produksi (kg)
1.	Pemindangan	104	1.955.673	104	1.844.069	104	2.587.067
2.	Ikan Asin	21	2.570.313	21	2.306.436	21	3.400.149
3.	Pemanggangan	155	1.061.608	155	1.229.376	155	1.404.408
4.	Trasi	22	199.160	22	153.676	22	193.401
5.	Pendinginan	51	10.230.271	51	9.220.345	51	13.807.706
6.	Cold Storage	1	793.039,88	1	614.689	1	421.334
	Jumlah	354	16.810.064,88	354	15.368.591	354	21.814.334

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati (2009)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah total produksi pengolahan ikan Kabupaten Pati terjadi penurunan pada tahun 2007 yaitu sebesar 1.441.473,88 kg dari tahun 2006, kemudian pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 6.445.743 kg dari tahun 2007. Dari perubahan total produksi tersebut penurunan tertinggi terjadi pada sektor pendinginan yaitu pada tahun 2007 sebesar 1.009.926 kg dari tahun 2006, begitu pula dengan kenaikan tertinggi terdapat pada sektor pendinginan pada tahun 2008 sebesar 4.587.361 kg dari tahun 2007.

Salah satu kelompok UMK pengolahan pangan sektor perikanan di Kabupaten Pati yang cukup berhasil adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Rukun Mina Barokah". Kelompok ini telah memulai kegiatannya sejak tahun 2000 dengan jumlah UMK sebagai binaan pertama kali sebanyak 27 UMK, usaha yang pertama kali dirintis adalah pemindangan ikan dan pengolahan ikan asin. Untuk meningkatkan hasil setelah kegiatan tersebut berjalan dilaksanakan diversifikasi usaha pengolahan pangan antara lain menjadi bakso ikan, rolade ikan, dan bandeng tanpa duri. Dalam melaksanakan kegiatan pengolahan ikan, kapasitas produksi mencapai kurang lebih 70 ton/hari. Kegiatan ini dilaksanakan

dengan memberdayakan masyarakat setempat untuk direkrut menjadi tenaga kerja. Data produksi ikan olahan KUB dapat diketahui pada tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Produksi Ikan Olahan KUB Rukun Mina Barokah**  
**Tahun 2005 - 2007**

No	Tahun	Produksi (kg)			
		Pindang	Ikan Asin	Ikan Basah	Total
1	2005	10.310.538	3.436.846	20.621.076	34.368.460
2	2006	10.152.606	3.384.201	20.305.211	33.842.018
3	2007	10.401.250	2.600.312	19.502.343	32.503.905

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati (2008)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa total produksi ikan olahan pada KUB mengalami penurunan dari tahun 2005-2007. Dari informasi awal, terjadinya penurunan produksi tersebut dikarenakan hasil tangkapan laut di TPI Juwana yang sedang mengalami penurunan. Selain hal tersebut juga dikarenakan oleh kekurangan modal usaha yang sedang dialami KUB.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memberikan bantuan kredit kepada UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah dengan harapan dapat digunakan dalam pengembangan usahanya. Bantuan kredit tersebut diberikan kepada KUB yang kemudian dibagikan secara langsung kepada masing-masing UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah sebesar Rp 5.000.000,00 per UMK. Bantuan Kredit tersebut dapat diangsur selama 2 tahun dengan bunga sebesar 6%. Apabila kredit tersebut sudah mampu dilunasi oleh UMK sampai pada jatuh tempo, maka UMK diperbolehkan untuk meminjam kembali dengan jumlah yang lebih besar akan tetapi untuk peminjaman tahap lanjut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam (UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah).

Objek dalam penelitian ini yaitu UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah yang bertempat di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Pengambilan objek tersebut adalah karena KUB Rukun Mina Barokah merupakan salah satu kelompok pengolahan ikan yang menjadi andalan di Kabupaten Pati dan menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan guna pengembangan usahanya. Penelitian ini melihat adakah perbedaan pada UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah sebelum dan sesudah memperoleh kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditinjau dari modal usaha, tenaga kerja, jumlah pembeli, total penjualan, dan keuntungan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah. Pada dasarnya UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah memiliki potensi yang sangat baik di Kabupaten Pati, akan tetapi UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah ini masih belum mampu berproduksi secara maksimal terbukti dari penurunan produksi dari tahun 2005-2007.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah tersebut antara lain (1) Pada saat cuaca buruk biasanya hasil tangkapan ikan sangat sedikit, sehingga pengolah kekurangan bahan baku dan harus membeli ikan sebagai bahan baku dari daerah lain, (2) Pada saat cuaca cerah biasanya hasil tangkapan ikan melimpah, pedagang tidak mampu memproduksi secara maksimal karena keterbatasan modal, (3) Resiko perdagangan yang cukup tinggi, terutama

tentang sistem pembayaran yang terkadang terjadi kesalahan dan mengakibatkan perputaran modal usaha yang sering tersendat-sendat, maka pedagang atau pengolah harus bisa mencari sokongan modal usaha dan menjalin hubungan bisnis sebagai rekan kerja yang benar-benar baik dan terpercaya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan berusaha mengatasinya dengan memberikan bantuan kredit pada tahun 2007 kepada masing-masing UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, maka dalam penelitian ini timbul pertanyaan “Apakah sesudah mendapatkan bantuan kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah mengalami peningkatan dalam hal modal usaha, tenaga kerja, jumlah pembeli, total penjualan, dan keuntungan?”

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis perkembangan UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah yang meliputi perkembangan modal usaha, tenaga kerja, jumlah pembeli, total penjualan, dan keuntungan.
2. Menganalisis perbedaan dalam hal modal usaha, tenaga kerja, jumlah pembeli, total penjualan, dan keuntungan pada UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

### **1.3.2 Kegunaan**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan mengenai kondisi UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah di kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sehingga pemerintah dapat merencanakan sesuatu program yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas UMK.
2. Bagi pengusaha sektor usaha kecil menengah, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan industrinya dan dapat mengetahui perkembangan UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan kredit dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai analisis perkembangan UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional, populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

## **BAB IV HASIL dan ANALISIS**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Usaha Mikro Kecil**

###### **2.1.1.1 Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kriteria UMKM adalah sebagai berikut: (1.) Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2.) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMK berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha Mikro (UM) merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Usaha Kecil (UK) merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.

Menurut Bank Indonesia, definisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah sebagai berikut:

Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki keluarga, sumberdaya lokal, dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry (SK Dir BI No.31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei 1998).

Usaha Kecil adalah Aset lebih kecil dari Rp 200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp 1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar.Boleh berbadan hukum, boleh tidak (Undang-Undang No.9/1995 tentang Usaha Kecil).

#### **2.1.1.2 Peran Usaha Mikro dan Kecil**

UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Menurut Anderson (dikutip Sulistyastuti, 2004) dalam membangun satu tipologi untuk tahap-tahap industri suatu Negara kontribusi industri kecil dan rumah tangga sangat penting dalam proses industrialisasi dalam tahap awal yaitu sebesar 50% hingga 75%. Perkembangan usaha mikro dan kecil diawali dari IKRT (Industri Kecil Rumah Tangga) yang bergerak dalam industry garmen, sepatu, kerajinan tangan, maupun makanan yang bahan bakunya dari sektor pertanian.

Tahap berikutnya ditandai dengan bermunculannya workshop-workshop yang sederhana yang menggantikan rumah sebagai lokasi. Pada tahap kedua ini, keberadaan usaha mikro dan kecil juga telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat. Demikian mengenai lokasi usaha, dimana pada tahap awal lokasi cenderung dipedesaan, namun pada tahap kedua ini mulai tersebar kedaerah perkotaan baik urban maupun sub urban. Perkembangan manajemen dan perluasan pasar, difusi inovasi, dan adopsi teknologi makin meningkat. Selanjutnya perusahaan-perusahaan yang berskala kecil berkembang menjadi skala ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan manajerial serta teknologi.

Teori klasik memiliki pandangan yang berbeda dengan teori modern mengenai peran Usaha Mikro dan Kecil. Menurut pandangan teori klasik Usaha Mikro dan Kecil berperan dalam proses industrialisasi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Peran Usaha Mikro dan Kecil yang paling populer dan sangat penting adalah kemampuannya menyerap kesempatan kerja.

Usaha kecil memiliki peran komplementer dengan perusahaan besar dalam penciptaan kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi (Giaoutzi, et al dalam Sulistyastuti, 2004). Sedangkan teori modern memandang bahwa pentingnya eksistensi serta perkembangan usaha mikro dan kecil berkaitan dengan spesialisasi yang fleksibel dalam produksi dan ekspor (Piore dan Sabel dikutip Sulistyastuti, 2004).

Menurut Noer Sutrisno (2004) usaha mikro dan kecil memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi yang ditunjukkan oleh sejumlah indikator sebagai berikut:

1. Ketika pertumbuhan mencapai 4,8 persen tahun 2000 dimana Usaha besar (UB) belum bangkit, banyak pakar memperkirakan hal tersebut ontribusi dari usaha mikro dan kecil selain dari sektor konsumsi.
2. Hasil survey 1998 ketika awal krisis terhadap 225 ribu usaha mikro dan kecil diseluruh Indonesia menunjukkan bahwa hanya 4 persen saja usaha mikro dan kecil menghentikan bisnisnya, 64 persen tidak mengalami perubahan omzet, 31 persen omzetnya menurun, dan bahkan 1 persen justru berkembang.
3. *Technical Assistant* ADB pada tahun 2001 juga melakukan survei terhadap 500 usaha mikro dan kecil di Medan dan Semarang yang memberikan hasil bahwa 78 persen usaha mikro dan kecil menjawab tidak terkena dampak krisis moneter.

Menurut Rudjito (2003) terdapat lima aspek utama yang menjadi alasan mengapa UMK memiliki peran strategis yaitu:

1. Aspek manajerial, yang meliputi peningkatan produktifitas/ omset/ tingkat utilisasi/ tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumberdaya manusia
2. Aspek permodal usaha, yaitu meliputi bantuan modal usaha (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit
3. Pengembangan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat system bapak- anak angkat, PIR, keterkaitan hulu- hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir- hulu (*backward linkage*), modal ventura, atau subkontrak
4. Pengembangan sentra industry dalam satu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil) yang didukung UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri)
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), Kopinkra (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan)

Menurut Setyobudi (2007) UMK dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UMK cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, yaitu:

1. Jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Pada tahun 2005 tercatat jumlah UMK adalah 44,69 unit atau 99,9% dari jumlah total unit usaha
2. Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMK dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMK menyerap 77,68 juta tenaga kerja atau 96,77% dari total angkatan kerja yang bekerja
3. Kontribusi UMK dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 54,22% dari total PDB

#### **2.1.1.3 Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro dan Kecil**

Menurut Hafsah (2004), bahwa pada umumnya permasalahan yang di alami Usaha Mikro dan Kecil adalah:

1. Faktor Internal
  - a. Kurangnya Permodal Usahaan

Permodal usahaan merupakan faktor utama yang digunakan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodal usahaan UMK, Kurangnya permodal usahaan UMK, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal usaha dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal usaha pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan

secara administrative dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

2. Faktor Eksternal

a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan,

namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan system ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

d. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau

tidak mau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu maka diharapkan UMK perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

e. Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

f. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Menurut Rafinaldy (2006), permasalahan Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Produktivitas

Perkembangan kinerja UMK yang meningkat dari segi kuantitas belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMK yang memadai, khususnya skala usaha mikro. Masalah yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Demikian pula dengan

perkembangan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan kecil yang belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kinerja seperti ini berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas sumberdaya manusia UMK, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMK. Peningkatan produktivitas UMK sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antar pelaku, antar golongan pendapatan, dan antar daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, sekaligus mendorong peningkatan daya saing nasional.

## 2. Terbatasnya Akses UMK Kepada Sumberdaya Produktif

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki akses yang terbatas kepada sumberdaya produktif, terutama permodal usaha, teknologi, informasi, dan pasar. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal usaha kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMK keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Perbankan menerapkan persyaratan pinjaman yang tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak. Di samping itu, perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar, masih memandang UMK sebagai kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Pada tahun 2005, untuk skala jumlah pinjaman dari perbankan sampai dengan Rp 50 juta, terserap hanya sekitar 24 persen ke sektor produktif, selebihnya terserap ke sektor konsumtif. Bersamaan dengan itu,

penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pasar masih jauh dari memadai serta memerlukan biaya yang relatif besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMK. Sementara itu, ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMK juga belum berkembang, karena pelayanan kepada UMK masih dipandang kurang menguntungkan.

### 3. Masih Rendahnya Kualitas Kelembagaan dan Organisasi Koperasi

Sampai dengan akhir tahun 2005, jumlah koperasi mencapai 134.963 unit meningkat sebanyak 4.233 unit atau 3,24% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah anggota sebanyak 27,3 juta orang yang mengalami penurunan 236 ribu orang atau turun 0,86% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun jumlahnya cukup besar dan terus meningkat, kinerja koperasi masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh, jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2005 adalah sebanyak 94,82 ribu unit atau hanya sekitar 70,25% dari koperasi yang ada. Di antara koperasi yang aktif tersebut hanya 45,51 ribu koperasi atau sekitar 48% yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), salah satu perangkat organisasi yang merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi koperasi. Selain itu, secara rata-rata baru 27% koperasi aktif yang mempunyai manajer koperasi.

#### 4. Tertinggalnya Kinerja Koperasi dan Kurang Baiknya Citra Koperasi

Kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik-praktik berkoperasi yang baik (*best practices*) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar, yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di Indonesia, yakni : a.) Koperasi yang didirikan tanpa didasari dengan adanya kebutuhan/ kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggota, sehingga kehilangan jatidirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya/mandiri; b.) Koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi modern sebagaimana layaknya sebuah badan usaha; c.) Masih terdapat kebijakan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi; d.) Koperasi masih sering dijadikan oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya, yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi. Sebagai akibat dari kondisi di atas, maka kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya; dan citra koperasi di mata masyarakat menjadi kurang baik. Lebih

lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian, dan dukungan masyarakat kepada koperasi.

#### 5. Kurang Kondusifnya Iklim Usaha

Koperasi dan UMK pada umumnya juga masih menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, di antaranya adalah: (a) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (b) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; dan (c) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMK. Di samping itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMK, ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat, sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, bahkan telah meningkatkan pelayanan kepada koperasi dan UMK dengan mengembangkan pelayanan satu atap. Namun, masih terdapat daerah lain yang memandang koperasi dan UMK sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu, sehingga biaya usaha koperasi dan UMK meningkat. Di samping itu, kesadaran tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan pengelolaan lingkungan masih belum berkembang. Oleh karena itu, aspek kelembagaan perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh, dalam rangka memperoleh daya jangkau hasil dan

manfaat yang semaksimal mungkin, mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha dan tersebarnya UMK.

Menurut Suharjono (2003) permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro meliputi:

1. Masalah finansial
  - a. Kurangnya kesesuaian (*mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh usaha mikro.
  - b. Tidak adanya yang sistematis dalam pendanaan usaha mikro.
  - c. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
  - d. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
  - e. Bunga kredit untuk investasi maupun modal usaha kerja yang cukup tinggi.
  - f. Banyak usaha mikro yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.
  - g. Masalah nonfinansial.
  - h. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.

- i. Kurangnya pengetahuan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dijangkau oleh usaha mikro mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan usaha mikro untuk menyediakan produk jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
  - j. Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
  - k. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.
2. Masalah *linkage* dengan perusahaan
- a. Industri pendukung yang lemah.
  - b. Usaha mikro yang memanfaatkan atau menggunakan sistem klaster dalam bisnis belum banyak.
  - c. Masalah ekspor.
  - d. Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dimanfaatkan.
  - e. Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor.
  - f. Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor.
  - g. Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.

## **2.1.2 Kredit**

### **2.1.2.1 Pengertian Kredit**

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksudnya bagi pemberi kredit adalah percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai

jangka waktu yang telah disepakati. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta factor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pengertian Kredit menurut Undang - Undang RI N. 10 tentang perbankan (1998) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian Kredit di atas, dapat dikatakan bahwa:

1. Adanya penyerahan uang atau tagihan
2. Adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur
3. Adanya satu syarat bagi pihak debitur berkenaan dengan pinjaman dan bunga yang harus dibayar pada jatuh tempo

Menurut Suyatno (1991) definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

### 2.1.2.2 Jenis- jenis Kredit:

Menurut Kasmir (1998) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi jangka waktu (*maturity*)

a). Kredit jangka pendek (*short term loan*)

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasana digunakan sebagai modal usaha kerja.

Contohnya: untuk perumahan; misalnya: Kredit pemilikan rumah atau untuk pertanian; misalnya: tanaman padi atau palawija.

b). Kredit jangka menengah (*medium term loan*)

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun biasanya untuk investasi. Sebagai contoh: Kredit untuk pertanian seperti: jeruk, peternakan sapi.

c). Kredit jangka panjang (*long term loan*)

Jangka kredit yang pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun, biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit seperti kredit perumahan.

2. Dilihat dari segi jaminan (*collateral*)

a). Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kedit yang diberikan dengan jaminan, jamina tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya

kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b). Kredit dengan tanpa jaminan (*unsecured loan*)

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

3. Dilihat dari sektor usaha terdiri dari:

a). Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka panjang atau jangka pendek.

b). Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya; peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c). Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai usaha kredit menengah dan besar.

d). Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau timah.

e). Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

f). Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti: dosen, dokter, atau pengacara.

g). Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

4. Dilihat dari segi tujuan kredit:

a). Kredit komersial (*commercial loan*)

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

b). Kredi konsumtif (*consumer loan*)

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada tambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh: Kredit untuk perumahan, kredit untuk mobil pribadi, kredit untuk peralatan rumah tangga, kredit untuk konsumtif lainnya.

c) Kredit produktif (*productif loan*)

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh: kredit untuk pembangunan pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kedit pertanian akan menghasilkan pertanian atau kredit pertambangan akan menghasilkan bahan tambang atau industry kredit lainnya.

5. Dilihat dari segi kegunaannya:

a). Kredit modal kerja:

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya: kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku,

membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b). Kredit investasi

Biaya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi: misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang kecenderungannya pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.

### **2.1.2.3 Fungsi dan Tujuan Kredit**

Menurut Martono (2003) secara garis besar fungsi dan tujuan kredit dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh sepenerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran uang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus dari suatu wilayah kewilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah kewilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha. Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan keusahaannya karena adanya tambahan modal yang banyak.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional dapat meningkatkan saling membutuhkan antara sipenerima

kredit dengan sipemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

#### **2.1.2.4 Prinsip Dasar Pemberian Kredit**

Dalam keputusan kelayakan pemberian kredit bagi calon debitur, lembaga keuangan seperti bank-bank formal umumnya memiliki standart penilaian tertentu. Standart yang sering dipakai bank tersebut adalah prinsip 5C.

Menurut Munawir (2000) pendekatan analisis mengenai prinsip 5C tersebut adalah:

##### *1. Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

##### *2. Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya, termasuk kekuatan yang dimiliki.

### 3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) dengan menggunakan ukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitasnya, dan rentabilitasnya serta ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

### 4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan secepat mungkin.

### 5. *Conditions*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk dimasa yang akan datang sesuai sector masing-masing serta diakibatkan dengan prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut Hadjiwijaja dan Wirasasmita (2000) penilaian dengan konsep 3R adalah sebagai berikut:

1. *Return* (hasil yang dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur dengan kredit, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya dan perusahaan bisa berkembang terus atau tidak.

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Bank harus menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pinjamannya pada saat-saat kredit harus dicicil atau dilunasi.

3. *Risk ability and bearing* (kemampuan untuk menanggung resiko)

Bank harus menilai sampai sejauh mana perusahaan mampu menanggung resiko kegagalan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Judul	Tujuan	Model	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan
Hening Mustika Pritariani. 2009. Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Binaan BKM Arta kawula di kecamatan Semarang Barat kota Semarang.	Menganalisis perkembangan dan perbedaan UMK antara sebelum dan sesudah adanya binaan dari BKM Arta kawula yang meliputi modal usaha, ongkos, teknologi, mutu, total penjualan, keuntungan dan jumlah pembeli.		1.) Variabel Dependen: Perkembangan UMK 2.) Variabel Independen: Modal, Ongkos Produksi, Teknologi, Mutu, Total Penjualan, Keuntungan, Jumlah pembeli.	1.) Uji Validitas dan Reliabilitas 2.) Analisis Chi-Square 3.) Analisis Wilcoxon	1.) Terdapat perbedaan modal usaha, ongkos produksi, teknologi, mutu, total penjualan, jumlah pembeli, dan keuntungan sebelum dan sesudah adanya binaan dari BKM Arta Kawula. 2.) Faktor yang tidak mempengaruhi perkembangan UMK di Kecamatan Semarang Barat yaitu faktor keuntungan.

<p>Zulkarnain Lubis. 2007. Dampak Penyaluran Kredit Terhadap Kinerja Usaha Petani dan Pemberdayaan Ekonomi Petani</p>	<p>1.) Mengetahui bagaimana dampak pemberian kredit oleh <i>Credit Union</i> Terhadap Kinerja Usaha Tani Petani Anggota <i>Credit Union</i>. 1.) Mengetahui Pengaruh Penyaluran Kredit Dalam Memberdayakan Ekonomi Petani yang Menjadi Anggota <i>Credit Union</i></p>		<p>Variabel Bebas: Besarnya Kredit yang Diminta. Variabel Tak Bebas: Kinerja Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja, Skala Usaha</p>	<p>1.) Analisis Statistika Deskriptif 2.) Regresi Berganda</p>	<p>1.) Kredit yang Didistribusikan oleh UC Berhasil Memberdayakan Ekonomi Petani Anggotanya dengan Meningkatkan Pendapatan Keluarga, Pengeluaran, dan Simpanan. 2.) Pengaruh Kredit Signifikan Terhadap Kinerja Usaha Tani dan Keadaan Ekonomi Petani Anggota CU, Terkait Keberadaan CU Sebagai Koperasi yang Memprogramkan Pendidikan Guna Meningkatkan Kemampuan Anggotanya Dalam Mengelola Usaha Tani.</p>
---	--	--	--	--	---

<p>Anonim. 2006. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha UMK di Propinsi Sumatera Utara</p>	<p>Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah di Propinsi Sumatera Utara</p>		<p>1.) Variabel pertama meliputi faktor internal: Total Penjualan, Jenis Produk, Modal Usaha, Harga Bahan Baku, Ongkos Transportasi, Jumlah Unit Usaha, Jumlah Pembeli, Ongkos Produksi, Teknologi, Daerah Pemasaran, Diversifikasi Produk. Variabel kedua meliputi faktor eksternal: Bantuan Kredit, Pelatihan Teknis dan Manajemen, Studi Banding, Perluasan Pemasaran, Pembinaan Pola Bapak Angkat, Promosi Pameran, Perbaikan</p>	<p>Analisa Deskriptif</p>	<p>Ranking Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Kecil dan Menengah Per Kelompok Usaha adalah: 1.) Faktor internal: Modal, Tenaga Kerja, Teknologi, Pemasaran, Inovasi, Manajemen Usaha. 2.) Faktor eksternal: Ketersediaan bahan baku, Kondisi ekonomi, Keamanan, Sarana dan prasarana, Kondisi sosial ekonomi, Fasilitas ekonomi.</p>
--	--	--	---	---------------------------	--

<p>Anonim. 2006. Kajian Dampak Program Perkreditan dan Perkuatan Permodalan Usaha Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Daerah</p>	<p>1.) Menganalisis Jenis Program Perkreditan dan Perkuatan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah  2.) Menganalisis Dampak Program Perkreditan dan Perkuatan Permodalan UKM Terhadap Perekonomian Daerah  3.) Menganalisis Kinerja Usaha Kecil dan Menengah yang Sudah</p>		<p>Transportasi, Pembentukan Forum Asosiasi Pengusaha, Pembentukan Jaringan Usaha Lokal dan Internasional.</p> <p>1.) Permodalan Usaha Kecil dan Menengah  2.) Produksi Usaha Kecil dan Menengah  3.) Volume Usaha dari usaha Kecil dan Menengah</p>	<p>1.) Analisa Regresi Linier  2.) Analisa Deskriptif</p>	<p>1.) Berdasarkan Hasil Regresi Linier, Perkuatan Permodalan UKM Diperuntukkan Untuk Pembelian Bahan Baku dan Peralatan Berpengaruh Positif Terhadap Volume Usaha Meskipun Pengaruh Tersebut Tidak Signifikan. Dengan Meningkatnya Volume Usaha Akan Berpengaruh Pada</p>
---	--	--	--	---	--

<p>Andri Yulianto Hertanto. 2006. Peranan Analisis Laporan Keuangan Dalam Efektivitas Penilaian Permohonan Kredit</p>	<p>Memperoleh Program Perkreditan dan Perkuatan Modal</p> <p>1.) Untuk mengetahui penilaian analisis keuangan terhadap permohonan kredit perusahaan 2.) Untuk mengetahui prosedur yang</p>		<p>1.) Variabel Dependen: Efektifitas permohonan kredit 2.) Variabel Independen: Analisis Laporan Keuangan yang memadai</p>	<p>1.) Metode deskriptif Kualitatif 2.) Analisis Statistik</p>	<p>Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa yang Berarti Pula Meningkatkan Perekonomian Daerah. 2.) Sebagian UKM Belum Melakukan Kewajibannya Membayar Pajak, retribusi, dan Pungutan-pungutan Lainnya Kecuali UKM di Propinsi Sumatera Utara.</p> <p>1.) Proses analisis keuangan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat X di Lembang telah dilaksanakan secara memadai. 2.) Pemberian kredit yang</p>
---	--	--	---	--	--

	<p>dilakkan perusahaan dalam menilai permohonan kredit; 3.) Untuk mengetahui peranan analisis laporan keuangan yang digunakan pihak bank dalam menunjang efektivitas penilaian permohonan kredit.</p>				<p>dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat X di Lembang telah dilakukan secara efektif. 3.) Penerapan analisis laporan keuangan sangat berperan dalam menunjang efektivitas penilaian permohonan kredit.</p>
--	---	--	--	--	---

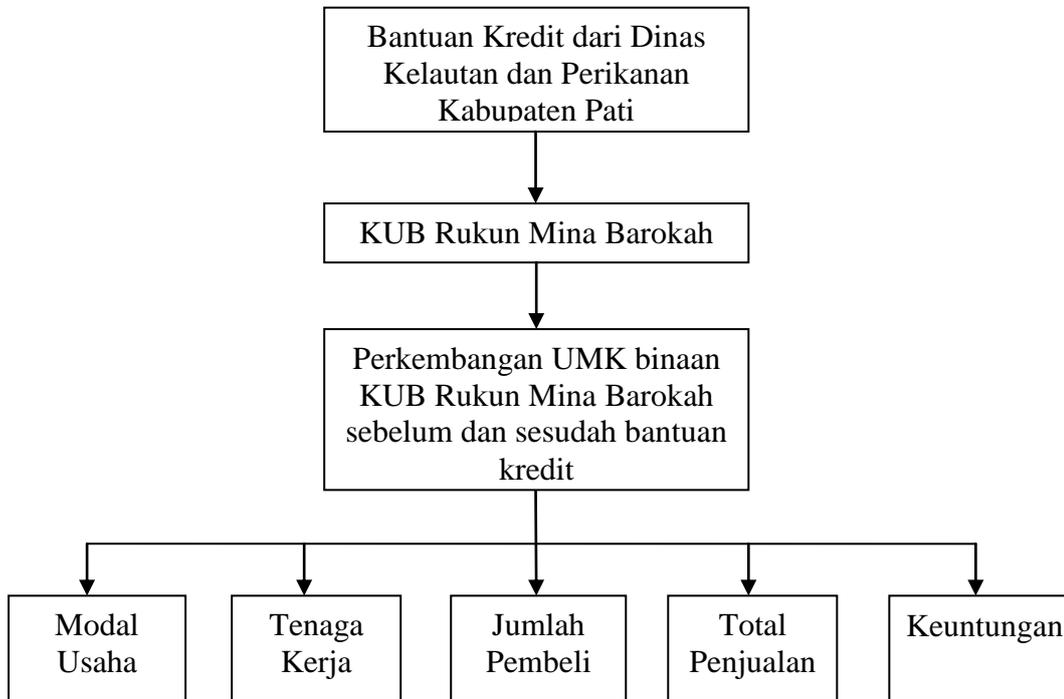
### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam perkembangannya, KUB dapat ditinjau dari sektor internal dan sektor eksternal. Secara internal perkembangan KUB dapat dilihat dari perkembangan manajemen usaha masing-masing UMK dan prestasi yang dapat di tunjukkan KUB, sedangkan secara eksternal perkembangan KUB dapat dilihat dari pembangunan jaringan dengan pemerintah *stakeholders* atau dinas terkait dan instansi-instansi lain.

Pada tahun 2007 KUB Rukun Mina Barokah mendapatkan dukungan keuangan atau bantuan kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Bantuan kredit tersebut kemudian di salurkan secara langsung kepada masing-masing UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah. Selain itu UMK yang merupakan binaan KUB juga pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati agar dapat mengembangkan usahanya hingga mampu menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Analisis tersebut akan melihat perbedaan besarnya modal usaha, tenaga kerja, jumlah pembeli, total penjualan, dan keuntungan pada UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoretis**



#### **2.4 Hipotesis**

Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam perkembangan UMK binaan KUB Rukun Mina Barokah yang meliputi modal usaha, tenaga kerja, jumlah pembeli, total penjualan, dan keuntungan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Menurut M Nasir (1998), definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi konsep berupa variabel yang digunakan. Definisi variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Modal usaha

Kemampuan finansial UMK dalam menjalankan operasional usahanya, atau untuk memproduksi barang dan atau jasa. Satuan untuk mengukur modal usaha berdasarkan nominal uang dalam rupiah.

2. Tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja pada masing-masing UMK. Satuan untuk mengukur tenaga kerja ini adalah berdasarkan jumlah pekerja yang bekerja pada masing-masing UMK.

3. Jumlah pembeli

Jumlah pelanggan yang membeli produk dan jasa yang ditawarkan oleh UMK. Satuan untuk mengukur adalah berdasarkan banyaknya jumlah

pembeli yang menjadi pelanggan dalam satu bulan pada masing-masing UMK.

#### 4. Total penjualan

Jumlah produk dan jasa yang laku terjual dimana penjualan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui total penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Satuan untuk mengukur total penjualan berdasarkan unit yang laku terjual setiap bulannya.

#### 5. Keuntungan

Keuntungan dapat diketahui dengan menghitung total penjualan dikurangi total biaya produksi. Satuan untuk mengukur keuntungan tersebut ditetapkan dalam bentuk nominal uang rupiah setiap bulannya.

### **3.2 Populasi Penelitian**

Menurut Arikunto (2002) populasi adalah subjek penelitian, dimana seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sugiyono (2007) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini merupakan studi populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMK pengolahan dan distribusi perikanan yang merupakan binaan dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rukun Mina Barokah di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Jumlah populasi adalah 45 UMK atau seluruh UMK

binaan KUB Rukun Mina Barokah yang mendapatkan kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Populasi yang berjumlah 45 UMK tersebut akan menjadi objek penelitian (responden) dalam penelitian ini.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data sangat diperlukan untuk menjawab persoalan penelitian dalam analisis. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Jenis data ini diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada masing-masing pengusaha atau UMK distribusi dan pengolahan ikan pada KUB Rukun Mina Barokah Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari KUB Rukun Mina Barokah, *download* melalui internet, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

### **3.4.1 Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan jawaban – jawaban responden dicatat secara sistematis. Wawancara dilakukan secara berstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara (Hasan, 2002).

### **3.4.2 Observasi**

Observasi yaitu peneliti mengadakan penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap fenomena yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Karena objek penelitian ini bersifat perilaku manusia (Sugiyono, 2000).

### **3.4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis serta arsip-arsip lainnya yang sesuai dengan penelitian.

Dalam penelitian ini berarti data sekunder dapat diperoleh dengan cara dokumentasi, karena dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis serta arsip-arsip lainnya yang sesuai dengan penelitian.

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Uji Validitas dan Reabilitas**

Sebelum pengambilan data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan. Menurut Singgih Santoso (2000), ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah angket, yaitu keharusan sebuah angket untuk valid dan reliabel. Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut, sedangkan suatu angket dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu.

##### **3.5.1.1 Uji validitas**

Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengertian valid tidaknya suatu alat ukur tergantung kemampuan alat tersebut untuk mengukur objek yang diukur dengan cermat dan tepat ( Sulyanto, 2005 ).

Suatu kuesioner dikatakan valid jika memiliki muatan faktor lebih besar dari 0,32 (muatan faktor  $> 0,32$ ) dan memiliki *pearson correlation* kurang dari 0,05 (*pearson correlastion*  $< 0,05$ ). Berikut kriteria kevalidan suatu kuesioner berdasarkan nilai KMO (*Kaiser Meyer Olkin*):

- a. KMO mendekati 1,00 = sangat baik
- b. KMO mendekati 0,80 = baik
- c. KMO mendekati 0,70 = cukup baik
- d. KMO mendekati 0,60 = sedang
- e. KMO mendekati 0,50 = buruk

### **3.5.1.2 Uji Reabilitas**

Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan hasil yang relatif sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi (Suliyanto, 2005).

Pengujian reabilitas terhadap seluruh item atau pertanyaan pada penelitian ini akan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Nilai *Cronbach Alpha* pada penelitian ini akan digunakan nilai 0.60 dengan asumsi bahwa daftar pertanyaan yang diuji akan dikatakan reliabel bila nilai *Cronbach Alpha*  $\geq 0.60$  (Nunally, 1996 dalam Ghozali, 2001).

### **3.5.2 Uji Statistik Pangkat Tanda Wilcoxon**

Menurut Supranto (2001), Uji statistik pangkat tanda wilcoxon termasuk jenis statistik non parametik, dipakai apabila peneliti tidak mengetahui karakteristik kelompok item yang menjadi sumber sampelnya Metode ini dapat diterapkan terhadap data yang diukur secara ordinal dan dalam kasus tertentu, dengan skala nominal. Pengujian non parametik bermanfaat untuk digunakan apabila sampelnya kecil dan lebih mudah dihitung daripada metode parametik. Dalam statistik non parametik, kesimpulan dapat ditarik tanpa memperhatikan bentuk distribusi populasi (statistik yang bebas distribusi).

Uji pangkat wilcoxon digunakan sebagai uji beda terhadap data yang diteliti yang berasal dari sejumlah responden yang sama pada suatu kelompok dan berkaitan dengan periode waktu pengamatan yang berbeda (sebelum dan sesudah pemberian kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati kepada UMK